

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul :

**Upaya Republik Indonesia dalam Mengatasi Tragedi Kemanusiaan di Rakhine
Myanmar (tahun 2012 - 2017)**



Reidha Taffy W.P

20140510255

Disetujui Oleh :



Bambang Wahyu N., S.IP., M.A.

Dosen Pembimbing

UPAYA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGATASI TRAGEDI KEMANUSIAAN DI RAKHINE MYANMAR (Tahun 2012-2017)

Oleh :

Reidha Taffy Wakuna Putri

reidhataffy21@gmail.com

ABSTRAK. Konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine telah berlangsung sejak lama yakni sejak pemerintahan Junta Militer di tahun 1962. Konflik yang terjadi di negara Myanmar telah menimbulkan dampak yang besar khususnya bagi komunitas muslim Rohingya, walaupun etnis lainnya juga terkena dampak dari konflik yang terjadi. Banyaknya masyarakat khususnya etnis Rohingya yang memilih untuk mengungsi dan mencari tempat perlindungan di negara lain seperti Bangladesh.

Pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Rakhine mengundang banyak perhatian dunia. Indonesia, sebagai negara yang mengedepankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif turut andil dalam penyelesaian konflik demi terciptanya perdamaian dunia. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu menyelesaikan tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Dengan menggunakan konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Indonesia menempuh beberapa cara untuk menghentikan dan membantu permasalahan yang terjadi di Myanmar.

Kata Kunci : Konflik, Politik luar negeri, dan Prinsip bebas-aktif

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang anti dengan aksi kekerasan dan penindasan seperti penjajahan. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipaparkan mengenai pernyataan bangsa Indonesia yang anti dengan adanya penjajahan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online, arti kata dari “penjajahan”, penjajahan adalah suatu proses atau cara, sementara arti kata dari jajah adalah menguasai dan memerintah suatu negeri atau daerah.¹ Setiap hal yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan seperti aksi kekerasan serta penindasan secara sadar ditentang oleh Indonesia, karena Indonesia telah mengalami sendiri pengalaman menjadi bangsa yang dijajah dan untuk terlepas dari penderitaan yang dialami selama dijajah oleh bangsa lain, Indonesia telah melalui perjuangan yang tidak mudah. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia.

Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan blok-blok kekuatan di dunia ataupun persekutuan militer, serta bangsa Indonesia juga berhak menentukan sendiri sikap menghadapi masalah-masalah yang ada. Aktif berarti Indonesia turut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan, membantu menyelesaikan permasalahan internasional, menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial di dunia serta aktif membantu meredakan ketegangan yang sedang terjadi di dunia.²

Permasalahan yang terjadi di Myanmar menyangkut komunitas muslim yang menjadi korban atas pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi di Rakhine. Konflik di Rakhine Myanmar pada tahun 2012 merupakan konflik antara etnis Rakhine dan etnis

¹ *Arti Kata Jajah*. (2017). Retrieved Oktober 30, 2017, from Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id>

² Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, hlm.17.

Rohingnya dimana etnis Rohingnya termasuk golongan minoritas muslim yang menetap di Myanmar. Etnis Rohingnya menjadi pihak yang dirugikan ataupun korban dari konflik ini. Berbagai pelanggaran HAM seperti kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan serta tidak mendapatkan hak kewarganegaraan yang berpengaruh pada sulitnya mendapatkan pekerjaan dan akses publik atau fasilitas umum.³ Tidak hanya pelanggaran HAM, namun juga memunculkan adanya gelombang pengungsi yang mencari tempat perlindungan di negara tetangga seperti negara Bangladesh.

Meletusnya permasalahan yang terjadi di Rakhine Myanmar membuat negara Indonesia ikut turun tangan dalam membantu mencari solusi penyelesaian. Karena jika tidak segera dicarikan solusinya maka akan semakin menambah korban. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang mencakup mayoritas komunitas muslim, dan sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas-aktif yang anti penjajahan dan penindasan berusaha untuk meredakan serta membantu penyelesaian masalah kemanusiaan yang menimpa komunitas muslim di Rakhine Myanmar.

2. PEMBAHASAN

A. Jalur Diplomasi

Langkah-langkah *soft diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia terhadap pemerintah Myanmar terkait memberikan solusi penyelesaian permasalahan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine sudah dilaksanakan semenjak meletusnya kembali konflik antar etnis Rakhine dan etnis Rohingnya pada tahun 2012 yang mengakibatkan ratusan warga baik itu etnis Rohingnya maupun etnis Rakhine menjadi korban atas tragedi tersebut. Di masa

³ Dewinta, R. T. (2016). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI). *Journal of International Relations*, hlm.127-128.

kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia mencoba untuk menawarkan bantuannya melalui surat yang dikirim oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada pemimpin Myanmar pada saat itu yakni Presiden Thein Sein. Pengiriman surat tersebut memiliki maksud untuk meminta pemerintah Myanmar agar menerima pengamat internasional untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine, dan pemerintah Indonesia juga menawarkan bantuan untuk mengatasi permasalahan di wilayah negara bagian Rakhine dengan mengirimkan ahli penyelesaian konflik komunal yaitu Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden negara Republik Indonesia pada masa itu, Jusuf Kalla sendiri telah diakui sebagai tokoh yang pernah menjadi mediator serta berpengalaman menangani masalah konflik dan perundingan damai di beberapa wilayah di dalam negeri seperti konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, dan Poso. Di bulan September 2012, Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan kunjungan ke Myanmar dan mengadakan perjanjian kerjasama antara Palang Merah Indonesia (PMI) dan otoritas Myanmar terkait pengiriman bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan serta membicarakan tentang rencana rekonstruksi paska konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Dari hasil pertemuan itu tercipta disetujuinya kerjasama dengan PMI yang memberikan dampak positif yaitu PMI dapat mengirim bantuan-bantuan ke lokasi yang sedang berkonflik ataupun yang terkena dampak dari konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine semakin memanas dan memunculkan permasalahan baru yaitu lahirnya kelompok ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) yang menyerang kepolisian Myanmar yang menimbulkan serangan balasan dari tentara Myanmar dan mengakibatkan terjadinya “operasi pembersihan” terhadap komunitas muslim Rohingya di wilayah negara bagian Myanmar. Atas kejadian tersebut, pada bulan September 2016 terkait tanggapan pemerintah

Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di istana negara, memberikan beberapa pernyataan yaitu :

1. Menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine,
2. Mendorong aksi nyata dalam penyelesaian konflik dan bukan hanya sekedar ucapan belaka seperti melayangkan ancaman ataupun kecaman terhadap Myanmar,
3. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus membantu atasi krisis kemanusiaan, dan juga dengan bantuan dukungan baik itu dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, serta
4. Menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan Sekretaris Jenderal PBB dan komisi penasihat khusus Rakhine State untuk membahas mengenai tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine.

Melalui kementerian luar negeri Republik Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya untuk menggunakan jalur diplomasi dalam membantu mengatasi tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Sehubungan dengan penugasan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk terus melaksanakan misi diplomatik di Myanmar, pada 6 Desember 2016 menteri luar negeri Retno Marsudi bertolak ke Myanmar. Kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kali ini membawa amanat dari Presiden Joko Widodo untuk membahas solusi penyelesaian konflik di Myanmar. Pertemuan yang diadakan di ibu kota Myanmar yakni Naypyidaw, dihadiri oleh Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan bersenjata Myanmar Jendral U Min Aung Hlaing, dan pertemuan ini membahas mengenai solusi penyelesaian untuk tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Pihak Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar

Negeri Retno Marsudi memberikan usulan solusi yang dikenal dengan sebutan “Formula 4+1”. Solusi “Formula 4+1” ini mencakup strategi-strategi melalui pendekatan seperti⁴ :

1. Pengembalian Stabilitas dan Keamanan

Menegaskan pentingnya keamanan dan stabilitas untuk mewujudkan upaya pembangunan yang inklusif. Memulihkan keamanan di wilayah Myanmar khususnya yang menjadi lokasi konflik untuk mencegah munambahnya korban dan untuk mengembalikan situasi yang normal tanpa adanya tindak kekerasan ataupun sikap permusuhan.

2. Menahan Diri Secara Maksimal dan Tidak Menggunakan Kekerasan

Semua pihak yang terlibat dalam konflik di wilayah negara bagian Rakhine Myanmar diharapkan untuk meredam emosi dan menghentikantindak kekerasan yang dilakukan, baik itu dari pihak militer Myanmar maupun kelompok-kelompok gerilyawan lainnya seperti ARSA dan masyarakat dari berbagai etnis. Himbauan dan harapan dari pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan kekerasan terhadap etnis Rohingya dengan segera.

3. Perlindungan Kepada Semua Orang Tanpa Memandang Status Etnis dan Agama

Menegaskan kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap semua tanpa kecuali, yakni harapan agar pemerintah Myanmar tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM untuk semua kalangan masyarakat baik itu etnis mayoritas maupun etnis minoritas yang berada di wilayah Myanmar, dan juga menekankan pada inklusivitas, yakni sikap toleransi atau penekanan terhadap masyarakat bahwa semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, hal tersebut dapat

⁴ Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada State Counsellor Myanmar. (2017, September 04). Retrieved February 25, 2018, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: www.kemlu.go.id

dijadikan sebagai dasar atau kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa komunitas muslim Rohingya di wilayah negara bagian Rakhine.

4. Memprioritaskan pentingnya pembukaan akses bagi bantuan kemanusiaan

Menekankan pada pentingnya akses langsung bantuan, yakni menegaskan kepada pemerintah Myanmar untuk lebih memudahkan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkena dampak konflik.⁵

Keempat poin utama diatas ialah 4 prioritas utama yang harus segera diwujudkan dalam membantu mengatasi permasalahan di wilayah negara bagian Rakhine. Selain keempat poin tersebut, masih terdapat 1 poin penting yakni :

5. Mengimplementasikan rekomendasi dari mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang termuat dalam Laporan Komisi Penasihat PBB yaitu :

- 1) Pemerintah Myanmar harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri ditegakkannya segregasi dari Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya.
- 2) Memastikan akses kemanusiaan melalui negara secara penuh dan tidak dikekang.
- 3) Mengatasi status kewarganegaraan Rohingya yang tidak bernegara dan meninjau ulang terkait Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982.
- 4) Menahan pelaku kejahatan yang bertanggungjawab dalam tragedi kekerasan yang melanggar HAM di wilayah negara bagian Rakhine.
- 5) Pelarangan dan pembatasan terhadap aksi-aksi gerakan kemerdekaan.⁶

Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi serta Jendral U Min Aung Hlaing membuahkan hasil

⁵ Pramudito. (2017, February). *Diplomasi Lunak Indonesia terhadap Myanmar*. Retrieved February 25, 2018, from www.kompas.com

⁶ *Indonesia Urges OIC : Cooperation for Solution to the Myanmar Problem*. (2017, September). Retrieved February 25, 2018, from Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia: www.kemlu.go.id

yaitu pemerintah Myanmar bersedia berkomitmen untuk mempermudah akses bantuan dan akses luar terhadap negara-negara lainnya untuk turut aktif berkontribusi dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan yang terjadi.

B. Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar (AKIM)

Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar (AKIM) adalah sebuah badan bentukan pemerintah Indonesia yang menggabungkan 11 organisasi masyarakat di Indonesia. 11 organisasi kemasyarakatan di Indonesia seperti Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim- Nahdlatul Ulama (NU), PKPU Human Initiative, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Dompot Perduli Ummat-Daarut Tauhiid, LAZIS Wahdah, Laznas LMI, Aksi Cepat Tanggap, Lazis Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, dan Social Trust Fund- UIN Jakarta. AKIM telah diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 31 Agustus 2017 sebagai bagian dari aksi Indonesia dalam membantu penyelesaian tragedi kemanusiaan di wilayah negara bagian Rakhine. Tujuan dari dibentuknya AKIM adalah untuk membantu krisis kemanusiaan terhadap masyarakat etnis Rohingya di Rakhine.⁷

Pembentukan AKIM oleh pemerintah Indonesia dimaknai sebagai respon nyata atas permasalahan yang terjadi di Myanmar. AKIM juga telah membentuk sebuah program yang disebut HASCO atau *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (Bantuan Kemanusiaan untuk Masyarakat yang Berkelanjutan), program ini berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dan pengembangan kapasitas untuk wilayah yang terkena dampak konflik. Program HASCO ini juga memprioritaskan bantuan terhadap 4 elemen dalam masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan *humanitarian relief* (pemenuhan

⁷ *Release Resmi Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)*. (2017, September 06). Retrieved February 26, 2018, from dtpedulidpu-daaruttauhid.org

kebutuhan dasar).⁸ Program ini menjadi sebuah tindak lanjut dari pemerintah Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar, dan tujuan dari terciptanya program HASCO ini adalah untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang masyarakat yang terkena dampak konflik di wilayah Rakhine secara inklusif dan dilaksanakan selama 2 tahun sejak AKIM diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yakni pada tahun 2017.

Pergerakan AKIM di wilayah Myanmar dalam membantu masyarakat yang terkena dampak konflik telah direalisasikan sejak setelah diresmikannya AKIM yakni pada Agustus 2017 silam. Di akhir tahun 2017, AKIM telah mengumpulkan dana yang mencapai 15 Miliar rupiah yang berasal dari berbagai donatur di Indonesia. Dana yang terkumpul kemudian didistribusikan menjadi berbagai bentuk barang kebutuhan hidup berupa kebutuhan sandang dan pangan, serta paket obat-obatan yang juga didistribusikan menggunakan truk-truk bantuan dari salah satu perusahaan Indonesia yang telah beroperasi lama di Myanmar yakni PT. Comfeed (*Japfa Comfeed Indonesia*) yang selama 18 tahun telah menjalankan bisnisnya di wilayah Myanmar. Selain bantuan sandang-pangan dan obat-obatan, AKIM juga merencanakan pembangunan fasilitas pendidikan yang sudah terealisasikan sampai saat ini 6 sekolah, dan tidak hanya dalam pendidikan saja namun pemerintah Indonesia melalui program-program dari AKIM juga berencana untuk mendirikan fasilitas kesehatan dan pelatihan tenaga medis di Myanmar. Melalui program-program yang dikeluarkan oleh AKIM, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus aktif membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine.

⁸ Menlu RI Menuju Myanmar Untuk Bertemu State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi. (2017, September 03). Retrieved Maret 15, 2018, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: www.kemlu.go.id

C. Peran Pemerintah Indonesia Melalui AKIM

Badan bentukan pemerintah Indonesia yakni AKIM, menjadi salah satu alat penghubung bagi Indonesia untuk membantu mengatasi permasalahan yang menimpa masyarakat etnis Rohingya di Myanmar. Melalui arahan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, AKIM melakukan tindakan pendekatan terhadap masyarakat Myanmar dan melakukan berbagai dialog untuk lebih mengetahui permasalahan yang telah terjadi serta solusi yang dapat diberikan secara tepat tanpa menimbulkan berbagai pertengkaran ataupun kecaman oleh beberapa pihak. Pendekatan yang dilakukan oleh anggota-anggota AKIM melalui pendekatan kemanusiaan dengan target 4 isu dasar yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan *humanitarian relief* (pemenuhan kebutuhan dasar).

Di bidang pendidikan, AKIM dengan bantuan beberapa pihak seperti PMI dan Pemerintah Indonesia telah membantu pembangunan sekolah bagi masyarakat Myanmar khususnya wilayah negara bagian Rakhine, dan sampai tahun 2017 telah terhitung sudah 6 unit sekolah telah di bantu pembangunannya. Di bidang kesehatan, AKIM berfokus pada penguatan fasilitas-fasilitas seperti memberikan bantuan pendirian klinik-klinik kesehatan dan pembangunan rumah sakit, pemberian ambulans, diadakannya pelatihan keperawatan maupun pendampingan kesehatan, dan pengiriman dokter serta peralatan medis. Dibidang ekonomi, lebih berfokus untuk menghidupkan kembali mata pencaharian bagi masyarakat Myanmar khususnya masyarakat yang terkena dampak dari tragedi kemanusiaan di wilayah negara bagian Rakhine, pemerintah Indonesia melalui AKIM merencanakan pembangunan sebuah pasar, selain memiliki tujuan untuk menambah penghasilan masyarakat juga agar pasar menjadi sebuah tempat berinteraksi antara seluruh masyarakat baik itu dari etnis yang berbeda pasar dapat dijadikan sebagai tempat interaksi tanpa memandang etnis. Sedangkan dalam bidang pemenuhan kebutuhan dasar atau *humanitarian relief*, AKIM masih mengandalkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia.

Bantuan kemanusiaan yang disalurkan masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban dari tragedi kemanusiaan dan tindak kekerasan di wilayah negara bagian Rakhine.

Pembentukan AKIM dan pelaksanaan program didalamnya menjadi bagian dari *soft diplomacy* yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan di wilayah negara bagian Rakhine. *Soft diplomacy* yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu cara yang dapat diterima oleh pemerintah Myanmar. Pendekatan inklusif, yang berfokus pada kemanusiaan tanpa memandang status agama maupun etnis menjadi salah satu langkah yang tepat untuk pemerintah Indonesia dalam menyikapi tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah Rakhine.

D. Perbandingan Upaya Pemerintah Indonesia Pada Era SBY dan Jokowi

Upaya pemerintah Indonesia dalam membantu permasalahan yang terjadi di Rakhine Myanmar telah melalui 2 periode kepemimpinan yakni pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Namun, terdapat beberapa perbandingan dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Rohingya di Rakhine Myanmar, seperti :

- 1) Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah meletusnya konflik di Myanmar, pemerintah Indonesia berulang kali melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar seperti menawarkan bantuan untuk mengirimkan ahli penyelesaian konflik dan kunjungan langsung Jusuf Kalla yang menghasilkan disetujuinya masuknya bantuan ke wilayah konflik Myanmar melalui PMI. Sementara pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah meletusnya konflik pemerintah Indonesia terbilang sedikit lambat dalam mengambil aksinya. Pemerintah Indonesia di masa Jokowi awalnya hanya sebatas mengeluarkan pernyataan-pernyataan tegas, sikap prihatin, dan rasa simpati terhadap para

korban konflik tanpa melakukan tindakan aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan baru muncul pada pertengahan tahun 2017 yang diawali dengan pengiriman bantuan kemanusiaan yang sebelumnya telah diusahakan pada masa pemerintahan SBY.

- 2) Untuk masalah penawaran solusi terhadap permasalahan di Rakhine Myanmar memiliki banyak perbedaan di masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Pada masa pemerintahan SBY, pemerintah Indonesia hanya berhasil untuk mengusahan izin untuk memberikan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah konflik di Myanmar. Sementara pada masa pemerintahan Jokowi, pemerintah Indonesia berhasil menawarkan solusi penyelesaian yang dinamakan “ Formula 4+1” dan berhasil membentuk sebuah badan yang berasal dari gabungan beberapa organisasi yang diresmikan dengan nama AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar) yang dijadikan sebagai alat penghubung untuk membantu penyelesaian masalah di Rakhine Myanmar.
- 3) Peran Menteri Luar negeri menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah Indonesia untuk membantu permasalahan di Rakhine Myanmar. Pada masa pemerintahan SBY, menteri luar negeri yang bertugas pada masa itu ialah Marty Natalegawa. Di setiap kesempatannya menghadiri forum-forum internasional seperti OKI, PBB, dan ASEAN, menteri luar negeri Marty selalu berusaha menyinggung permasalahan yang terjadi di Rakhine Myanmar untuk dijadikan topik pembahasan. Sementara, pada masa pemerintahan Jokowi, Menteri luar negeri Retno Marsudi melakukan berbagai aksi selain menyinggung masalah Rakhine dalam forum internasional, juga melakukan kunjungan langsung ke negara Myanmar untuk memberikan solusi penyelesaian konflik, dan menteri luar negeri Retno Marsudi juga membentuk AKIM yang menjadi bagian dari salah satu alat pendekatan untuk masalah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine Myanmar.
- 4) Pemerintah Indonesia pada masa Presiden SBY dan masa Presiden Jokowi sama-sama melakukan *soft diplomacy* untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di Myanmar.

Walaupun menggunakan cara dan aksi berbeda dalam pendekatannya, namun masih mengutamakan *soft diplomacy* sebagai langkah tindak lanjutnya. Mengingat sejarah hubungan baik yang telah dijalin oleh negara Indonesia dan negara Myanmar, pemerintah Indonesia juga lebih ekstra hati-hati dalam setiap langkah yang akan diambil dalam menyikapi permasalahan di Myanmar demi menjaga hubungan keduabelah pihak.

3. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya Indonesia dalam membantu mengatasi tragedi kemausiaan di wilayah negara bagian Rakhine sudah berada pada posisi yang tepat. Dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, yakni peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian di lingkungan internasional dan bebas dalam mengeluarkan tindakan ataupun kebijakan dalam membantu mengatasi permasalahan baik di lingkungan regional maupun internasional. Berlandaskan prinsip politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam membantu penyelesaian konflik di wilayah negara bagian Rakhine Myanmar. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga tidak jauh dari peran serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, serta masyarakat Indonesia yang juga ikut berperan dalam terlaksananya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tindakan atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti :

1. Langkah *Soft Diplomacy* menjadi pilihan pemerintah Indonesia untuk mengatasi konflik yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Pemerintah Indonesia lebih memilih

untuk melakukan soft diplomacy pada 2 periode yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yidhoyono dan masa pemerintahan Joko Widodo.

2. Pada masa pemerintahan SBY, pemerintahan Indonesia berhasil melakukan pengiriman bantuan ke wilayah-wilayah Konflik di Myanmar melalui PMI (Palang Merah Indonesia). Sementara pada masa pemerintahan Jokowi, pemerintah Indonesia berhasil menawarkan solusi yang disebut “Formula 4+1” dan membentuk badan gabungan bernama AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar).

DAFTAR PUSTAKA

Arti Kata Jajah. (2017). Retrieved Oktober 30 , 2017, from Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id>

Dewinta, R. T. (2016). PERAN ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) . *Journal of International Relations* , 127-128.

Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* , 17.

Indonesia Urges OIC, Cooperation for Solution to the Myanmar Problem. (2017, September). Retrieved Februari 25, 2018, from Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia: www.kemlu.go.id

Menlu RI Menuju Myanmar untuk Bertemu State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi. (2017, September 03). Retrieved Maret 15, 2018, from Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia: www.kemlu.go.id

Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada State Counsellor Myanmar. (2017, September 4). Retrieved February 25, 2018, from Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia: www.kemlu.go.id

Pramudito. (2017 , February). *Diplomasi Lunak Indonesia terhadap Myanmar*. Retrieved February 25, 2018, from www.kompas.com

Release Resmi Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). (2017, September 06). Retrieved February 26, 2018, from [dtpeduli: dpu-daaruttauhid.org](http://dtpeduli.dpu-daaruttauhid.org)